

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 yang kemudian disingkat TA 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 106.010.865 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 438.713.328.151 atau mencapai 97.80 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 448.601.310.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 263.714.532.779 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 9.257.438.625; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 254.442.885.404; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 14.208.750. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 9.420.420.859 dan Rp. 254.294.111.920.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 13.091.942, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 456.623.090.859

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 456.609.998.917). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp. 183.523.537) dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 456.793.522.454).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 106.276.663.022 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 456.793.522.454) ditambah dengan selisih revaluasi aset tetap senilai Rp ,-. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp. 157.747.980.000 Lain- lain sebesar Rp 17.128.166 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 447.045.863.186 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 254.294.111.920.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		0.00	106,010,865	0.00	149,853,608
JUMLAH PENDAPATAN		0.00	106,010,865	0.00	149,853,608
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	281,423,323,000	277,329,512,721	98.55	276,824,432,417
Belanja Barang	B.4	167,077,987,000	161,284,632,580	96.53	123,068,559,357
Belanja Modal	B.5	100,000,000	99,182,850	99.18	520,080,286
JUMLAH BELANJA		448,601,310,000	438,713,328,151	97.80	400,413,072,060

II. NERACA

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	21,938,358	2,112,000
Penyisihan Piutang Tak tertagih	C.2	(109,692)	(10,560)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		21,828,666	2,101,440
Persediaan	C.3	9,235,609,959	16,891,662,130
Jumlah Aset Lancar		9,257,438,625	16,893,763,570
ASET TETAP			
Tanah	C.4	231,074,952,000	73,326,972,000
Peralatan dan Mesin	C.5	18,461,803,821	21,027,863,254
Gedung dan Bangunan	C.6	27,716,854,823	27,716,854,823
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	479,245,200	479,245,200
Aset Tetap Lainnya	C.8	48,772,240	49,600,440
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(23,338,742,680)	(23,219,800,896)
Jumlah Aset Tetap		254,442,885,404	99,380,734,821
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	27,830,000	27,830,000
Aset Lain-Lain	C.11	7,375,000	212,851,130
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(20,996,250)	(217,920,866)
Jumlah Aset Lainnya		14,208,750	22,760,264
JUMLAH ASET		263,714,532,779	116,297,258,655
KEWAJIBAN			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.13	9,420,420,859	10,020,595,633
JUMLAH KEWAJIBAN		9,420,420,859	10,020,595,633
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	254,294,111,920	106,276,663,022
JUMLAH EKUITAS		254,294,111,920	106,276,663,022
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		263,714,532,779	116,297,258,655

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	13,091,942	2,995,100
JUMLAH PENDAPATAN		13,091,942	2,995,100
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	276,724,031,830	276,245,056,396
Beban Persediaan	D.3	362,073,340	58,639,500
Beban Barang dan Jasa	D.4	88,146,106,616	93,783,732,786
Beban Pemeliharaan	D.5	1,271,313,389	1,205,148,350
Beban Perjalanan Dinas	D.6	48,298,413,292	9,068,215,889
Beban Barang untuk Diserahkan kpd Masy.	D.7	39,049,742,219	45,265,000,341
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2,771,311,041	2,878,894,277
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	99,132	10,560
JUMLAH BEBAN		456,623,090,859	428,504,698,099
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(456,609,998,917)	(428,501,702,999)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(15,673,741)	14,629,413
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Pjg		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(167,849,796)	(2,245,585,791)
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	(183,523,537)	(2,230,956,378)
POS LUAR BIASA			
SURPLUS /(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.11	(456,793,522,454)	(430,732,659,377)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	106,276,663,022	133,986,201,561
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(456,793,522,454)	(430,732,659,377)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI			
EKUITAS			
Koreksi atas Reklasifikasi		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3	157,747,980,000	(160,771,393)
LAIN- LAIN	E.4	17,128,166	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	447,045,863,186	403,183,892,231
EKUITAS AKHIR	E.6	254,294,111,920	106,276,663,022

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 82/Per.B5/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi. Entitas berkedudukan di Jalan Airlangga No. 31 - 33, Surabaya, Jawa Timur.

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berkomitmen dengan visi **“menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan instansi dan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP/ TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Penilaian Persediaan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Nilai Persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (*sequential*) masuk persediaan. Hal ini diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar yang antara lain mencakup: pemakaian; transfer keluar; hibah keluar; penyerahan kepada masyarakat/pemda; penggunaan barang pemeliharaan; pemakaian untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; penyerahan dari belanja bantuan social (bansos); barang rusak/using; penghapusan lainnya; reklasifikasi keluar; koreksi keluar; serta penyesuaian hasil opname fisik dalam hal kuantitas berdasarkan opname fisik lebih kecil dibandingkan kuantitas berdasarkan pembukuan
- Seluruh transaksi persediaan harus dicatat secara berurutan sesuai tanggal terjadinya transaksi

- Pada saat barang keluar tidak dapat menentukan secara spesifik persediaan dengan harga satuan dan spesifikasi yang mana yang akan dikeluarkan. Untuk itu atas persediaan yang bersifat unik dan memerlukan pencatatan spesifik seperti barang persediaan dengan tujuan untuk diserahkan dengan spesifikasi yang berbeda-beda agar dilakukan pencatatan dengan menggunakan kode barang yang berbeda untuk menjaga validitas harga masing-masing barang. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Capaian Output Strategis

Capaian output Strategis satker 018030 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Bulan Desember 2022 yang telah kami upload di aplikasi SPAN. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah mencapai progress capaian output masing-masing 100% dengan realisasi volume keluaran sesuai dengan target. Adapun rincian daftar realisasi anggaran serta realisasi volume keluaran beserta progress capaian output sampai dengan Bulan Desember 2022 terlampir.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp. 106.010.865

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 106.010.865. Pendapatan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari denda pekerjaan pemerintah dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN		6,578,999	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		810,000	
Pendapatan Denda Peny Pekerjaan Pemerintah		12,281,942	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	86,339,924	-
Jumlah	-	106,010,865	-

Realisasi Pemindahtanganan BMN ini berasal dari hasil lelang 10 unit kendaraan dinas bermotor roda dua senilai Rp 6.578.999. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp 810.000,-. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diperoleh dari pendapatan sewa rumah dinas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur enam bulan. Adapun nilai sewa per bulan yaitu Rp 135.000. Realisasi pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah senilai Rp 12.281.942 dikarenakan adanya denda keterlambatan penyelesaian pengadaan Formulir Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 dengan data dan denda keterlambatan penyelesaian pengadaan stiker pengasuhan balita dalam Rangka Penurunan Stunting Kepada Masyarakat.

Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp 86.339.924 merupakan akumulasi dari penyetoran kembali kelebihan gaji maupun tunjangan pegawai tahun sebelumnya dan baru disetorkan melalui pemotongan langsung pada SPM senilai Rp 64.990.340,- serta melalui penyetoran dengan billing SIMPONI pada tahun 2022. Pemotongan pada SPM terkait pengembalian TAYL terdiri atas pengembalian tunjangan umum senilai Rp 185.000 dan pembulatan Rp 5.340. Senilai Rp 8.640.000 merupakan pengembalian TAYL yang dipotong langsung

melalui SPM Kekurangan gaji 1 pegawai terkait tunjangan jabatan fungsional penyetaraan Bulan September 2020 s.d Oktober 2022. Senilai Rp 56.160.000 merupakan pengembalian TAYL yang dipotong langsung melalui SPM Kekurangan gaji 29 pegawai terkait tunjangan jabatan fungsional penyetaraan Bulan Agustus 2020 s.d Oktober 2022. Sedangkan rincian bukti setor dengan billing SIMPONI yaitu pengembalian keterlambatan pembayaran gaji Februari 2021 PKB a.n Kanti Nurjannah senilai Rp 5.808.836 Tunjangan jabatan PKB Gresik a.n Siti Juwariyah dari Januari 2018 sampai dengan September 2021 senilai Rp 10.600.000. Tunjangan istri dan beras PKB a.n Tonny Liston dari September s.d Desember 2021 senilai Rp 2.112.000. Tunjangan Fungsional Desember 2021 PKB a.n Fanni Marzela senilai Rp 240.000. Tunjangan Jabatan Fungsional PKB a.n Ummu Sholihah Bulan Januari 2018 s.d September 2021 senilai Rp 862.916,-. Pembayaran ke dua dan tiga tunjangan jabatan a.n Ummu Sholihah Bulan Januari 2018 s.d September 2021 senilai Rp 1.725.832,-.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pndptn dari Pemindahtanganan BMN	6,578,999	14,629,999	
Pndptn Sewa Tanah,Gedung&Bangunan	810,000	-	
Pndptn Denda Keterlambatan Peny.Pek.Pem	12,281,942	2,995,100	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	86,339,924	132,228,509	-34.70
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			
Jumlah	106,010,865	149,853,608	-29.26

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami penurunan 29.26 persen dibandingkan 2021, dikarenakan turunnya pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL dibandingkan TA 2021.

B.2 Belanja

*Realisasi Belanja
Negara
Rp. 438.713.328.151*

Realisasi Belanja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 438.713.328.151,- atau 97.61 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 400.413.072.060,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	281,423,323,000	277,638,001,760	98.65
Belanja Barang	167,077,987,000	161,284,632,580	96.53
Belanja Modal	100,000,000	99,182,850	99.18
Total Belanja Kotor	448,601,310,000	439,021,817,190	97.86
Pengembalian Belanja	-	308,489,039	-
Jumlah	448,601,310,000	438,713,328,151	97.80

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 9.57 persen disebabkan antara lain:

1. Pagu Anggaran Belanja Barang pada TA 2022 lebih besar dibanding TA 2021.
2. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 31.05 persen dibandingkan TA 2021

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	277,329,512,721	276,824,432,417	0.18
Belanja Barang	161,284,632,580	123,068,559,357	31.05
Belanja Modal	99,182,850	520,080,286	(80.93)
Jumlah	438,713,328,151	400,413,072,060	9.57

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 277.329.512.721

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 277.329.512.721 dan Rp. 276.824.432.217. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.28 persen dari TA 2021 yang disebabkan oleh adanya Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan pegawai Bulan Desember 2021 dibayarkan di Januari 2022 dan adanya pembayaran gaji dan tunjangan PPPK di tahun 2022.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	REALISASI TA 2022 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	167,360,049,236	172,409,601,877	(2.93)
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg)	105,432,492,790	104,446,689,896	0.94
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3,050,330,160		
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg) PPPK	1,795,129,574		
Jumlah Belanja Kotor	277,638,001,760	276,856,291,773	0.28

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp
161.284.632.580,-

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 161.284.632.580 dan Rp. 123.068.559.357. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 31.05 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Kenaikan belanja barang TA 2022 ini seiring dengan naiknya pagu anggaran dibandingkan TA 2021. Selain itu kenaikan disebabkan oleh adanya kegiatan terkait pencapaian target PRO PN di satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, di antaranya pelaksanaan layanan audit kasus stunting, penyelenggaraan, kampanye serta pengawasan penurunan stunting, edukasi dan pelatihan kespro dan gizi bagi calon pengantin, pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI), realisasi terkait rumah data kependudukan, serta pemenuhan ketersediaan alat obat kontrasepsi di setiap faskes.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	5,357,019,102	2,342,702,988	128.67
Belanja Barang Non Operasional (5212)	46,686,835,583	71,058,810,957	(34.30)
Belanja Barang Persediaan (5218)	356,878,340	58,639,500	508.60
Belanja Jasa (5221)	36,108,915,506	20,391,413,588	77.08
Belanja Pemeliharaan (5231)	1,271,313,389	1,205,148,350	5.49
Belanja Perjalanan Dinas (5241)	48,298,413,292	9,068,215,889	432.61
Belanja Brg Utk diserahkan kpd Masy.(5261)	21,191,500	-	
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat (5263)	23,184,065,868	18,943,628,085	22.38
Jumlah Belanja Kotor	161,284,632,580	123,068,559,357	31.05
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	161,284,632,580	123,068,559,357	31.05

Belanja barang TA 2022 terdapat realisasi belanja barang dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Barang dalam Rangka Covid-19 TA 2022

KODE	URAIAN	Realisasi TA 2022
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi	2,932,539,590
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi	278,049,657
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi Covid-19	95,457,000
	Jumlah Belanja Kotor	3,306,046,247
	Pengembalian Belanja	-
	Jumlah Belanja	3,306,046,247

Belanja barang Operasional penanganan pandemi digunakan untuk keperluan terkait biaya komunikasi seperti pulsa dan paket data untuk kader pendataan keluarga, masker, handsanitizer, vitamin serta segala keperluan terkait. Belanja Barang Non-Operasional digunakan untuk pembelian pulsa/paket data bagi kader pendamping keluarga. Terkait keperluan rapid test, swab pegawai menggunakan Belanja jasa penanganan pandemi Covid-19.

B.5 Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp.99.182.850*

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.99.182.850 dan Rp. 520.080.286. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 80.93 persen seiring dengan turunnya pagu anggaran belanja modal. Selain itu pagu dan realisasi belanja modal peralatan mesin TA 2022 mengalami penurunan yang menyebabkan nilai realisasi belanja modal Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan TA 2021.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah (5311)	0	197,000,000	
Belanja Modal Peralatan & Mesin (5321)	99,182,850	262,580,286	-62.23
Belanja Modal Gedung Bangunan (5331)			
Belanja Modal lainnya (5361)		60,500,000	-
Jumlah Belanja Kotor	99,182,850	520,080,286	-80.93
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	99,182,850	520,080,286	-80.93

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp 21.938.358

Nilai Piutang Bukan Pajak pada TA 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.21.938.358 dan Rp. 2.112.000. Adanya Piutang Bukan Pajak pada TA 2022 disebabkan oleh adanya jurnal umum Pengembalian Tunjangan. Anak & Beras PKB a.n Partini senilai Rp 11.227.292 dan Erna Bintarti, S.Sos senilai Rp 10.711.066,-

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih
(Rp 109.692)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada TA 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp 109.692,-) dan (Rp. 10.560). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2022 ini muncul dikarenakan adanya jurnal akibat dari Piutang Bukan Pajak terkait Pengembalian Tunjangan. Anak & Beras PKB a.n Partini dan Erna Bintarti, S.Sos Bulan Januari 2018 s.d Desember 2022 yang baru dibayarkan di 2023.

C.3 Persediaan

Persediaan
Rp 9.235.609.959

Nilai Persediaan TA 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.235.609.959 dan Rp. 16.891.662.130. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	2022	2021
Barang Konsumsi	23,953,553	23,953,553
Persediaan Lainnya utk dijual/diserahkan ke masy.	9,211,656,406	16,867,708,577
Jumlah	9,235,609,959	16,891,662,130

Terdapat saldo penyesuaian persediaan di neraca percobaan akibat adanya koreksi jumlah pada persediaan dikarenakan gudang salah menuliskan kuantitas pada SBBK. SBBK Nomor 156/A/B/VII/2022 tanggal 28/07/2022 tertulis Formulir K/IV Pelayanan KB keluar sebanyak 33.596 buah, sehingga operator persediaan mengeluarkan sejumlah itu di SAKTI. Namun ternyata seharusnya gudang hanya mengeluarkan fisik barang 22.596. Jadi harus dilakukan koreksi jumlah di SAKTI sejumlah selisihnya yaitu 11.000 buah @Rp 109 senilai Rp 1.199.000.

Namun ketika proses koreksi di SAKTI, operator salah memilih jenis koreksi keluar, seharusnya koreksi jumlah masuk. Sehingga dilakukan koreksi masuk kembali.

Pada neraca percobaan juga terdapat persediaan barang rusak/ usang terkait barang persediaan lainnya untuk diserahkan masyarakat senilai Rp 253.276.720 berupa:

- 4 botol Oneclean 1 liter @Rp11.000 senilai total Rp 44.000
- 48.450 piece Tes kehamilan @Rp 1.900 senilai total Rp 92.055.000
- 124 box Silk 2/0 + ½ GT35 mm @Rp 110.000 senilai total Rp 13.640.000
- 619.600 buah Asam mafenamat 500 mg @Rp 218 senilai total Rp 134.948.880
- 5.780 strip Mafenamic acid 500 mg @Rp 2.178 senilai total Rp 12.588.840

C.4 Tanah

Tanah
Rp 231.074.952.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 231.074.952.000 dan Rp. 73.326.972.000.

Aset berupa tanah terletak di:

1. Jl. Rejo Aman II, Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
2. Jl. Manukan Kulon Blok 15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
3. Jl. Raya Singosari No. 1, Kelurahan Losari, Kabupaten Malang;
4. Jl. Kalimantan No. 22, Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember.

Rincian saldo tanah TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Awal Tanah

No.	KIB	Alamat	Luas	Nilai Perolehan Awal
1	2010101004	Jl. Rejo Aman II, Surabaya	700 m2	Rp 884.900.000,00
2	2010101004	Jl. Manukan Kulon Blok 15, Surabaya	195 m2	Rp 224.600.000,00
3	2010104001	Jl. Raya Singosari 1, Malang	2930 m2	Rp 2.388.000.000,00
4	2010104001	Jl. Kalimantan 22, Jember	8260 m2	Rp 6.622.085.000,00
Jumlah				Rp 10.119.585.000,00

Rincian Nilai Tanah Setelah Penilaian Kembali Aset Tanah

Alamat	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2021	Nilai 2022
Jl. Rejo Aman II, Surabaya	4,481,400,000	4,481,400,000		
Jl. Manukan Kulon Blok 15, Sby	2,295,930,000	2,295,930,000		
Jl. Raya Singosari 1, Malang	15,022,110,000	14,925,420,000		
Jl. Kalimantan 22,Jember	49,741,720,000	51,329,222,000		
Pembuatan Akta Notaril Tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur			98,000,000	
Pengurusan sertifikat tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur			197,000,000	
Revaluasi Tanah Perwakilan BKKBN Jawa Timur (Jalan Airlangga Surabaya)				109,264,900,000
Revaluasi tanah Balai Latbang (Jalan Kalibokor Surabaya)				48,483,080,000
Jumlah	71,541,160,000	73,031,972,000	73,326,972,000	157,747,980,000

Untuk sertifikat tanah dijelaskan sebagai berikut :

- Tanah seluas 700 m2 sebesar Rp. 884.900.000,00 beralamat di Jl. Rejo Aman II, Bendul Merisi, Wonocolo, Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat Nomor: 12.01.02.12.4.00001, tanggal penerbitan sertifikat 16-12-1996.
- Tanah seluas 195 m2 sebesar Rp. 224.600.000,00 beralamat di Manukan Kulon atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat Nomor : 12.01.14.15.4.00043, tanggal penerbitan sertifikat 30-04-1993.
- Tanah seluas 2930 m2 sebesar Rp. 2.388.000.000,00 beralamat di Raya Singosari atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat nomor : 12.30.21.44.0.00002, tanggal penerbitan sertifikat 07-08-2007.
- Tanah seluas 8260 m2 sebesar Rp. 6.622.085.000,00 beralamat di Jl. Kalimantan Jember atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan sertifikat nomor : 12.34.72.04.4.00046, tanggal penerbitan sertifikat 23-03-1990.

- Hasil penilaian kembali pada aset berupa 4 titik tanah Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 61.421.575.000,-
- Hasil penilaian kembali pada aset berupa tanah di Malang dan Jember yaitu sebesar Rp 1.490.812.000,-
- Pembuatan akta notariil tanah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 98.000.000,-
- Pengurusan sertifikat tanah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 197.000.000,-
- Hasil penilaian kembali pada aset berupa tanah di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Jalan Airlangga dan Kalibokor Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 157.747.980.000,-

C.5 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp 18.461.803.821*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 adalah Rp. 18.461.803.821 dan Rp. 21.027.863.254. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	21,027,863,254
Mutasi tambah:	99,182,850
Mutasi kurang:	(2,665,242,283)
Saldo per 31 Desember 2022	18,461,803,821
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(15,434,016,495)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3,027,787,326

Mutasi tambah peralatan mesin berasal dari pembelian laptop, wifi, mesin absensi, PC unit, printer dan CCTV. Sedangkan mutasi kurang berasal dari adanya barang yang sudah dilakukan usul hapus seperti lemari besi, lemari kayu, mesin ketik, meja kerja, rak dan perkakas lainnya.

C.6 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan
Rp. 27.716.854.823*

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 adalah Rp.27.716.854.823 dan Rp.27.716.854.823. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	27,716,854,823
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	27,716,854,823
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(7,709,301,481)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	20,007,553,342

Tidak terdapat mutasi tambah dan Mutasi kurang dari gedung bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 479.245.200

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 479.245.200 dan Rp. 479.245.200. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	479,245,200
Mutasi tambah:	-
Saldo per 31 Desember 2022	479,245,200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(195,424,704)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	283,820,496

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp. 48.772.240

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah Rp.48.772.240 dan Rp.49.600.440 . Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak, bahan kartografi dan barang bercorak kesenian dengan daftar barang terlampir. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	49,600,440
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	(828,200)
Saldo per 31 Desember 2022	48,772,240
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	48,772,240

Tidak terdapat mutasi tambah aset tetap lainnya. Sedangkan mutasi kurang yaitu dari monografi, lukisan, kartografi dan lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp.23.338.742.680)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp 23.338.742.680) dan (Rp.23.219.800.896) . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 adalah:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	21,027,863,254	15,434,016,495	5,593,846,759
2	Gedung dan Bangunan	27,716,854,823	7,709,301,481	20,007,553,342
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	479,245,200	195,424,704	283,820,496
4	Aset Tetap Lainnya	49,600,440	0	49,600,440
Akumulasi Penyusutan		49,273,563,717	23,338,742,680	25,934,821,037

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp.27.830.000,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) TA 2022 dan 2021 adalah Rp. 27.830.000,- dan Rp. 27.830.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	27,830,000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	27,830,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(13,626,250)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	14,203,750

Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang terkait aset tak berwujud.

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp.7.375.000

Saldo Aset Lain-lain TA 2022 dan 2021 adalah Rp. 7.375.000 dan Rp. 212.851.130. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	160,173,014
Mutasi tambah:	2,666,070,483
Mutasi kurang:	(2,818,868,497)
Saldo per 31 Desember 2022	7,375,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(7,370,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	5,000

Adapun mutasi tambah dan kurang berasal barang-barang yang tidak digunakan lagi.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya (Rp.20.996.250)*

C.12 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp 20.996.250) dan (Rp.217.920.866). Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya TA 2022 dan 2021

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	27,830,000	(13,626,250)	14,203,750
2	Aset Lain-lain	160,173,014	(7,370,000)	152,803,014
Akumulasi Penyusutan		188,003,014	(20,996,250)	167,006,764

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp.9.420.420.859*

C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022 senilai Rp 9.420.420.859 Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Pada TA 2022, utang kepada pihak ketiga ini muncul dari transaksi akrual yaitu Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PNS dan PPPK serta kekurangan gaji pegawai TA 2022 yang dibayarkan di Januari 2023 serta Tagihan pemakaian listrik, telepon, dan air 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023.

*Ekuitas
Rp.254.294.111.920*

C.14 Ekuitas

Ekuitas TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 254.294.111.920 dan Rp.106.276.663.022. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp. 13.091.942

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 13.091.942 dan Rp. 2.995.100.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	810,000	-	
Pendapatan Denda Keterlambatan Peny. Pek. Pem	12,281,942.	2,995,100	
Jumlah	13,091,942	2,995,100	337.11

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah TA 2022 berasal dari denda keterlambatan penyelesaian Pengadaan Formulir Pemutakhiran PK-22 Dengan Data Melalui E-Katalog TA 2022 Berdasarkan Kuitansi No. PSI-RDS-SB-2210002 Tgl 26 Oktober 2022 dan denda keterlambatan penyelesaian pengadaan Pengadaan Cetak Stiker Internalisasi Pengasuhan Balita Dalam Rangka Penurunan Stunting Kepada Masyarakat TA 2022 sesuai Kontrak No 12381/KEU.801/J.1/2022 Tgl 5 Sept 20 22, BAST No 17360/KEU.801/J.1/2022.

Beban Pegawai
Rp. 276.724.031.830

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 276.724.031.830 dan Rp. 276.245.056.396. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	167,040,428,341	172,529,954,687	(3.18)
Beban Tunjangan Khusus PNS	104,818,740,010	103,715,101,709	1.06
Beban Gaji PPPK	2,988,322,160		
Beban Tunjangan Khusus PPPK	1,876,541,319		
Jumlah	276,724,031,830	276,245,056,396	0.17

Beban pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.17 persen bila dibandingkan TA 2021. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai dari PPPK sehingga terjadi kenaikan beban gaji dan tunjangan khusus.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 362.073.340,- dan Rp. 58.639.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	362,073,340	58,639,500	517.46
Jumlah Beban Persediaan	362,073,340	58,639,500	517.46

Beban persediaan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 517.46 persen dibandingkan TA 2021 seiring dengan naiknya pagu belanja barang. Beban persediaan berasal dari naiknya belanja persediaan konsumsi. Hal ini dikarenakan pada TA 2022 ini pandemi telah berakhir sehingga kegiatan telah dilakukan secara optimal, sehingga persediaan konsumsi pun juga mengalami kenaikan. Perhitungan beban persediaan konsumsi ini meliputi pembelian sebesar Rp 364.037.840,- koreksi kuantitas tambah Rp 2.398.000,- transfer masuk online Rp 3.996.000,- reklasifikasi keluar (Rp 7.159.500) koreksi kuantitas kurang (Rp 1.199.000).

Adapun penjelasan terkait koreksi kuantitas tambah dan kurang yaitu adanya koreksi jumlah pada persediaan dikarenakan gudang salah menuliskan kuantitas pada SBBK. SBBK Nomor 156/A/B/VII/2022 tanggal 28/07/2022 tertulis Formulir K/IV Pelayanan KB keluar sebanyak 33.59

6 buah, sehingga operator persediaan mengeluarkan sejumlah itu di SAKTI. Namun ternyata seharusnya gudang hanya mengeluarkan fisik barang 22.596. Jadi harus dilakukan koreksi jumlah di SAKTI sejumlah selisihnya yaitu 11.000 buah @Rp 109 senilai Rp 1.199.000. Namun ketika proses koreksi di SAKTI, operator salah memilih jenis koreksi keluar, seharusnya koreksi jumlah masuk. Sehingga dilakukan koreksi masuk kembali sebanyak dua kali sebagai perbaikan atas koreksi dan sebagai koreksi itu sendiri.

Sedangkan reklasifikasi keluar muncul akibat adanya penyesuaian kode barang yang telah dicatat oleh operator komitmen dan pendetilan oleh operator persediaan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.88.146.106.616*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 88.146.106.616 dan Rp. 93.783.732.786. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Terdapat penurunan sebesar 6.01 persen dibandingkan TA 2021. Hal itu dikarenakan pada TA 2022 terdapat penurunan beban barang non operasional penanganan Covid-19, beban barang operasional dan non operasional lainnya, Beban jasa penanganan pandemic covid-19, Beban pengiriman pengiriman surat pos, beban penambah daya tahan tubuh, beban langganan listrik dan honor operasional satuan kerja

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
BEBAN BARANG			
Beban Keperluan Perkantoran	2,047,034,012.	1,786,405,440	14.59
Beban Penambah Daya Tahan Tubul	14,250,000.	16,800,000	(15.18)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	8,535,500.	13,948,000	(38.80)
Beban Honor Operasional Satuan Ke	345,060,000.	345,510,000	(0.13)
Beban Barang Operasional Lainnya	9,600,000.	12,000,000	(20.00)
Beban Barang Opr.- Penanganan pandemi Covid19	2,932,539,590.	168,039,548	1,645.15
Beban Bahan	18,140,083,066.	9,402,938,926	92.92
Beban Honor Output Kegiatan	231,940,000.	42,060,000	451.45
Beban Barang Non Operasional Lain	27,860,728,360.	52,581,630,335	(47.01)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	168,875,000.	50,400,000	235.07
Beban Barang Non Opr Penanganan Pandemi Covid19	278,049,657.	8,979,171,696	(96.90)
BEBAN JASA			
Beban Langganan Listrik	431,283,870.	441,738,992	(2.37)
Beban Langganan Telepon	25,130,464.	20,120,630	24.90
Beban Langganan Air	29,069,938.	22,782,350	27.60
Beban Jasa Konsultan	56,793,125.		
Beban Sewa	2,094,578,800.	218,262,900	859.66
Beban Jasa Profesi	8,106,625,000.	4,913,950,000	64.97
Beban Jasa Lainnya	25,270,473,234.	14,626,011,471	72.78
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid19	95,457,000.	141,962,498	(32.76)
Jumlah	88,146,106,616	93,783,732,786	(6.01)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp. 1.271.313.389*

Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.271.313.389 dan Rp. 1.205.148.350. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	418,854,057	383,988,833	9.08
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	852,459,332	821,159,517	3.81
Jumlah	1,271,313,389	1,205,148,350	5.49

Terdapat kenaikan beban pemeliharaan sebesar 5.49 persen dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan tersebut berasal dari pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar 9.08 persen yaitu berupa pengecatan gedung Balai Diklat Jember dan untuk renovasi kelas C serta Dapur Balai Latbang Surabaya. Sedangkan pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 3.81 persen yaitu dari pemeliharaan AC, printer maupun laptop.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.48.298.413.292*

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.298.413.292 dan Rp. 9.068.215.889. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 432.61 persen bila dibandingkan dengan TA 2021. Kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan lebih dioptimalkan, terlebih untuk pencapaian Proyek Prioritas Nasional terkait penurunan stunting dan pemenuhan ketersediaan alat obat kontrasepsi di setiap faskes yang tentunya menggunakan perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7,177,481,316.	6,685,787,489	7.35
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,692,900,000.	518,810,000	3695.78
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota	12,046,092,850.	738,928,800	1530.21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,381,939,126.	1,124,689,600	734.18
Jumlah	48,298,413,292	9,068,215,889	432.61

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp.39.049.742.219*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.39.049.742.219 dan Rp. 45.265.000.341. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	39,049,742,219.	45,265,000,341	-13.73
Jumlah	39,049,742,219	45,265,000,341	-13.73

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 mengalami penurunan sebesar 13.73 persen bila dibandingkan dengan dengan TA 2021. Penurunan ini berasal dari beban barang persediaan lainnya untuk diserahkan masyarakat yang berkurang sesuai kebutuhan.

Pada daftar transaksi pembelian persediaan terdapat akun 117199 Persediaan lainnya. Akun tersebut muncul dikarenakan pada awal pembelian, modul komitmen salah mencatat dengan kode barang 10104xxx sehingga membentuk akun 117199 Persediaan lainnya. Namun pada modul persediaan telah dilakukan reklas keluar dan reklas masuk ke kode barang 10105xxx sesuai akun yang benar 117128 Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan masyarakat.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.2.771.311.041*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.771.311.041 dan Rp. 2.878.894.277. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2022	2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,345,457,795.	1,448,722,783	(7.13)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,409,326,958.	1,409,326,957	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	9,568,788.	11,532,288	(17.03)
Beban Amortisasi Software	6,957,500.	4,276,250	62.70
Beban Amortisasi ATB tidak digunakan		5,035,999	(100.00)
Jumlah Penyusutan	2,771,311,041	2,878,894,277	(3.74)

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar 3.74 persen bila dibandingkan dengan TA 2021. Penurunan tersebut berasal dari

Beban Amortisasi ATB tidak digunakan yang sudah tidak ada lagi pada TA 2022. Selain itu beban Penyusutan jaringan dan Peralatan dan Mesin juga mengalami penurunan seiring dengan turunnya belanja peralatan mesin.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp 99.132*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 99.132 dan 10.560. Beban penyisihan ini berasal dari Jurnal penyisihan piutang atas pengembalian tunjangan Anak dan tunjangan beras Bulan Januari 2018 s.d Desember 2022 yang dibayar 2023.

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp. 183.523.537)*

D.10 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp 183.523.537) dan Rp. (Rp. 2.230.956.378).

*Surplus/Defisit LO
(Rp
456.793.522.454)*

D.11 Surplus/ Defisit LO

Surplus/ (defisit) LO merupakan penjumlahan dari surplus/(defisit) kegiatan operasional dan non operasional. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengalami Defisit LO TA 2022 dan 2021 yaitu (Rp 456.793.522.454) dan (Rp 430.732.659.377).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.106.276.663.022

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 106.276.663.022 dan Rp. 133.986.201.561.

Surplus/Defisit LO
(Rp
456.793.522.454)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 456.793.522.454) dan Rp. 430.732.659.377. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas
Rp 157.765.108.166

E.3 Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas

Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 157.765.108.166 dan Rp (160.771.393). Koreksi tersebut merupakan revaluasi atau perubahan nilai/kuantitas pada alat nilai tanah perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Jalan Airlangga dan Balai Latbang KKB Jalan Kalibokor senilai Rp 157.747.980.000 dan koreksi lainnya terkait Jurnal atas pengembalian tunjangan anak dan beras Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2021 senilai Rp 17.128.166.

Lain- lain
Rp 17.128.166

E.4 Lain- lain

Nilai lain- lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 17.128.166 dan Rp 0. Nilai lain- lain tersebut berasal dari koreksi lainnya terkait Jurnal atas pengembalian tunjangan anak dan beras Bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2021 yang dibayar pada Januari 2023 atas nama Partini sebesar 8.760.560 dan Erna Bintarti sebesar Rp 8.367.606.

Transaksi Antar Entitas
Rp.447.045.863.186

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 447.045.863.186 dan Rp. 403.183.892.231. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain (313111)	438,713,328,151
Diterima dari Entitas Lain (313121)	(106,010,865)
Transfer Keluar (313211)	(228,000,000)
Transfer Masuk (313221)	8,666,545,900
Jumlah	447,045,863,186

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp.106.010.865) sedangkan DKEL Rp.438.713.328.151.

2. Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.666.545.900. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 228.000.000,-).

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.254.294.111.920

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 254.294.111.920 dan Rp. 106.276.663.022.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terjadi pandemi COVID-19 mulai Bulan Februari 2020. Hal tersebut berpengaruh pada anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada satker. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan beberapa kegiatan pertemuan klasikal menjadi virtual. Sistem kerja *work from home* juga diberlakukan demi memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Namun mulai Bulan Oktober 2021 PPKM Jawa Timur mulai turun level sehingga beberapa kegiatan dan pertemuan mulai bisa dilakukan secara langsung.

F.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah Rekening Virtual Bendahara pada PT Bank Negara Indonesia 9898320180301000 a.n. BPG 031 PERWAKILAN BKKBN PROV JATIM, Jalan Airlangga No. 31 – 33 Surabaya.

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 39/KP.05.01/PEG/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021, maka diperintahkan:

Kepala Perwakilan : Dra. Maria Ernawati, MM

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

- Nomor: 10081/KU.201/J.1/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Tugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, dan Staf Pengelola Keuangan.

- Nomor: 10080/KU.201/J.1/2020 Tentang Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, maka ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. Maria Ernawati, MM

Pejabat Pembuat Komitmen :

1. Nyigit Wudi Amini, S.Sos, M.Sc

2. Heny Tria Wahyuning Diah, SE, MA

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : dr. Sofyan Rizalanda, M.Kes

Bendahara Pengeluaran : Arditya Dwi Andini Putri, ST

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO
 periode : DESEMBER satker : 018030

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Target	Satuan	Keluaran (Data Sakti)	
				Pagu	Realisasi*	%			S.d Bulan Des 2022	
									RVRO	PCRO (%)
1	3331	QDD002	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	1,752,780,000	1,735,781,650	99.03	1360	Kelompok Masyarakat	1360	100
2	3331	PEA001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6,379,990,000	6,175,791,675	96.8	39	kegiatan	39	100
4	3331	QDE001	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	6,913,073,000	6,831,967,320	98.83	1474500	Keluarga	1474500	100
8	3331	QAH001	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	7,097,862,000	6,696,008,886	94.34	38	kab/kota	38	100
9	5297	QIF001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	62,940,000	60,430,600	96.01	1	Layanan	1	100

11	5297	PEA001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1,621,000,000	1,594,984,242	98.4	1	kegiatan	1	100
12	3331	QMA001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	43,991,094,000	41,289,459,220	93.86	38	layanan	38	100
13	3331	QDD004	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB	3,815,339,000	3,814,493,974	99.98	350	Kelompok Masyarakat	350	100
16	3331	UBA001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	1,146,830,000	1,122,500,333	97.88	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100
17	3331	UBA002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	2,074,100,000	2,049,822,305	98.83	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	38	100
18	3331	PBG001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	150,000,000	142,373,125	94.92	2	rekomendasi kebijakan	2	100
19	3331	QEI001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	23,487,481,000	23,462,319,947	99.89	2054	Faskes	2054	100
23	3331	QDD003	Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	865,213,000	859,964,496	99.39	114	Kelompok Masyarakat	114	100
24	3331	QMB001	'Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	23,264,998,000	21,297,089,180	91.54	1	layanan	1	100
25	3331	SCM001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	28,154,637,000	28,071,908,338	99.71	93734	Orang	94684	100
27	3331	QMA003	Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	2,191,749,000	2,152,150,500	98.19	1	layanan	1	100

29	5297	QAH001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	131,250,000	122,073,314	93.01	1	layanan	1	100
30	3331	QDD001	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	3,406,880,000	3,365,883,955	98.8	3920	Kelompok Masyarakat	3919	99.97